

**EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL KEPALA
DESA DI DESA BINTUAS KECAMATAN NATAL**

SKRIPSI

Oleh :

RINO HARDIANTO

1503100003

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : RINO HARDIANTO
NPM : 1503100003
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL KEPALA DESA DI DESA BINTUAS KECAMATAN NATAL

Medan, 16 Maret 2019

PEMBIMBING



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : RINO HARDIANTO
NPM : 1503100003
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH, MM
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH
PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.LKom



Aggul, Cerdas & Terpercaya

Bisa menjawab surai ni agar diebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Rino Hardianto
NPM : 1903100003
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Koordinasi Vertikal Kepala Desa di Desa Bintuas Kecamatan Natal

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	02/04/19	Revisi Proposal : Latar belakang, kerangka konsep, kategorisasi, Narasumber	f.
	09/01/19	Latar belakang, halaman kutipan, kerangka konsep, kategorisasi	f.
	05/01/19	Penulisan, kerangka konsep	f.
	07/01/19	ACC Proposal	f. f.
	26/01/19	Draf Wawancara	f. f.
	28/01/19	Masih draf wawancara	f. f.
	29/01/19	ACC draf wawancara	f. f.
	28/02/19	Revisi bab iv.	f. f.
	06/03/19	Revisi bab 4 wawancara dan pembahasan	f. f.
	11/03/19	ACC skripsi	f.

Medan,2019...

Dekan,

Dra Arifin Saleh S.Sos. M.SP

Ketua Program Studi,

Naili Khairiah S.IP. M.Pd

Pembimbing ke :

Ananda Mahardika S.Sos. M.SP

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya manusia senantiasa mengembangkan segala kemampuan untuk terus berkarya dan beribadah. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena karunia Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusun dimasa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini terangkum berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang mana penulis mengangkat judul “**Efektivitas Koordinasi Vertikal Kepala Desa di Desa Bintuas Kecamatan Natal**” sebagai kewajiban semester akhir program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh gelar Strata 1 (S1).

Pada kesempatan kali ini penulis sertakan ucapan terimakasih penulis yang sebesar - besarnya kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT

2. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Dirman dan ibunda Rohanur tersayang serta adik penulis Selvi Dayanti yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari mereka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah S.ip, MPd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP, selaku pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Rasdan, selaku Kepala desa Bintuas Kecamatan Natal.

10. Teman terbaik penulis Eka Ramadhan, Rija Br Bancin, Selvy Widya Rahmi Aceh, Novita Amalia, Nurul Safitri, Juliardi, dan lain-lain yang selalu memberikan penulis semangat, motivasi dan dukungan selama penulis mengikuti perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
11. Yang teristimewa Wilda Yanti Harianto yang membantu dan selalu memberikan penulis motivasi serta dukungan dan semangat ketika mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman – teman seperjuangan penulis yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah bersama –sama berjuang untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini.

Terimakasih juga untuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bekerja sama dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat kiranya memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis
Rino H Ardianto
1503100003

Efektivitas Koordinasi Vertikal Kepala Desa di Desa Bintuas Kecamatan Natal

Rino Hardianto
1503100050

Abstrak

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas koordinasi vertikal di desa Bintuas Kecamatan Natal. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara ilmiah dan rasional, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pikiran dan reverensi bagi penelitian yang juga meneliti dengan judul yang sama khususnya dibidang administrasi Negara, memberi kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis pengolahan data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah koordinasi vertikal yang dilakukan kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan belum bisa dikatakan baik, itu bisa dilihat dari pelaksanaan-pelaksanaan koordinasi yang dilakukan kepala desa tidak maksimal dan koordinasi vertikal yang dilakukan kepala desa tidak terjadwa semana mestinya, dengan begitu koordinasi-koordinasi yang dijalankan kepala desa tidak berjalan dengan baik.

Koordinasi vertikal yang dilakukan kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal tidak berjalan efektif, hal itu dapat dilihat tidak adanya perencanaan, strategi untuk mencapai tujuan yang tidak berjalan maksimal, pengarahan langsung yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, serta kerja sama yang dilakukan tidak efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Koordinasi Vertikal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar belakang.....	1
1.2.Rumusan masalah	5
1.3.Tujuan penelitian	5
1.4.Manfaat penelitian	5
1.5.Sistematika penelitian	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1. Konsep efektivitas.....	7
2.1.1. Pengertian efektivitas.....	7
2.1.2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas.....	8
2.1.3. Ukuran efektivitas	9
2.1.4 Kriteria efektivitas	11
2.2. Konsep koordinasi Vertikal	13
2.2.1. Pengertian koordinasi.....	13
2.2.2. Prinsip koordinasi	14
2.2.3. Syarat koordinasi	15

2.2.4. Manfaat koordinasi	15
2.2.5. Sifat koordinasi	16
2.2.6. Cara-cara mengadakan koordinasi.....	17
2.2.7. Masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif	17
2.2.8. Pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi Yang efektif	18
2.2.9. Koordinasi vertikal.....	19
2.3. Kepala desa	20
2.3.1. Pengertian kepala desa.....	20
2.3.2. Tugas dan wewenang kepala desa	21
2.3.3. Peranan kepala desa	22
2.3.4. Desa.....	23
2.3.5. Wewenang desa	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis penelitian.....	25
3.2. Kerangka konsep.....	26
3.3. Defenisi konsep.....	28
3.4. Kategorisasi.....	28
3.5. Narasumber	29
3.6. Teknik pengumpulan data.....	31
3.6.1. Data primer	31
3.6.2. Data sekunder.....	31
3.7. Teknik analisis data.....	31
3.7.1. Reduksi data.....	32

3.7.2. Penyajian data	32
2.7.3. Penarikan kesimpulan	32
3.8. Lokasi dan waktu penelitian	33
3.8.1. Waktu Penelitian.....	33
3.8.2. Lokasi penelitian.....	33
3.9. Deskripsi ringkas objek penelitian.....	33
3.9.1. Visi misi desa Bintuas.....	33
3.9.2. Tugas pokok dan fungsi perangkat desa	34
3.9.3. Struktur organisasi	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1 Distribusi narasumber	41
4.2. Deskripsi hasil wawancara.....	42
4.2.1. Adanya perencanaan yang baik	42
4.2.2. Adanya strategi pencapaian tujuan	45
4.2.3. Adanya pengarahan langsung dari atasan kepada bawahan	48
4.2.4. Adanya kerja sama.....	51
4.3. Pembahasan.....	53
4.3.1. Adanya perencanaan yang baik	54
4.3.2. Adanya strategi pencapaian tujuan	55
4.3.3. Adanya pengarahan langsung dari atasan kepada bawahan	57
4.3.4. Adanya kerja sama.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62

5.1. Simpulan	62
5.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin.....	41
Tabel 4.2	distribusi rnarasumber menurut umur.....	41
Tabel 4.3	distribusi responden menurut tingkat pendidikan.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	27
Gambar 3.2 Struktur organisasi desa pemerintahan desa bintuas	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Draf Wawancara
- Lampiran III : SK- 1 Pemohonan Persetujuan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran IV : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK – 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa Bintuas adalah desa yang terletak di kecamatan Natal, kabupaten Mandailing Natal, provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk di desa Bintuas kurang lebih 1000 orang terdiri 377 Kepala Keluarga (KK). Di desa Bintuas terdiri dari suku mandailing dan melayu dan kepercayaan masyarakat di desa Bintuas adalah islam. kondisi wilayah desa Bintuas berada di jalan lintas pantai barat yang menghadap ke pantai. Mata pencarian masyarakat yang ada di desa Bintuas adalah petani dan nelayan, sekitar 60% masyarakat berprofesi sebagai petani dan 40% sisanya berprofesi sebagai nelayan.

Desa Bintuas adalah salah satu desa yang masih minim pembangunannya terkhusus di pembangunan insfratrukturnya yang tidak memadai. Dimana, pembangun insfratraktur adalah salah satu untuk meningkatkan ekonomi di desa karna dengan adanya insfratraktur yang memadai akan mempermudah masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian karena dengan infratraktur masyarakat lebih aktif dalam meningkatkan ekonominya, misalnya, dari segi transportasi. Dengan menggunakan transportasi masyarakat lebih cepat dalam pengelolaan ekomominya.

Di sini lah peran pemerintahan desa untuk menjalankan koordinasi vertikal kepada perangkat desa. Dalam menjalankan pemerintahanya, pemerintah desa Bintuas menggunakan pedoman-pedoman salah satunya tentang peraturan

pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2004 tentang desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan beberapa hal antara lain yang mengatur tentang ketentuan umum desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa. Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 114 mengenai Pembangunan Desa, dimana salah satu kewenangan kepala desa yaitu mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

Kepala desa mengkoordinasi sekretaris desa, kepala Urusan (kaur) desa, serta perangkat desa lainnya. Kepala desa mengkoordinasi bawahannya dalam kegiatan pemerintahan misalnya dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun pengalokasian dana desa dan lain-lain.

Kepala desa sebagai pemimpin formal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya di tingkat desa. Pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintah desa dalam pembangunan tidak terlepas dari figur pemimpin Kepala Desa. Kedudukan yang strategis dimiliki kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan

pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan di tingkat desa.

Untuk memaksimalkan kewenangan pemerintah desa maka diperlukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Menurut Hasibuan (2011:85) Koordinasi adalah kegiatan yang menggerakkan, meningkatkan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M yaitu *Man, Money, Materials, Machines, Methods, Market*) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pengamatan pada koordinasi vertikal yang dimana lebih mempengaruhi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan bersama. Karena koordinasi vertikal lebih efektif digunakan kepala desa dalam memantau perangkat desa.

Upaya mencapai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan sangat diharapkan dapat mencegah dan menghilangkan titik pertentangan, para pejabat atau petugas terpaksa berfikir dan berbuat dalam hubungan sasaran dan tujuan bersama, dapat mencegah terjadinya konflik, serta dapat mengembangkan daya improvisasi para pejabat atau petugas karena dalam rangka koordinasi mereka mau tidak mau harus mendapatkan cara dan jalan yang cocok bagi pelaksanaan-pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan mencapai keseimbangan dan keserasian.

Kurangnya koordinasi kepala desa dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa, dimana dengan menerapkan kedisiplinan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja dalam bekerja mengingat bahwa perangkat desa bekerja

dalam pelayanan untuk masyarakat. Koordinasi kepala desa dalam mengkoordinasi bawahan dalam pembangunan infrastruktur tidak maksimal, misalnya dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang tidak transparan.

Kendala yang di hadapi dalam pembangunan infrastruktur yaitu masyarakat yang tidak mengijinkan lahan nya untuk digunakan. itu di karenakan tidak efektifnya koordinasi kepala desa terhadap sekretaris desa maupun kaur desa. itu bisa kita lihat di kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa, misalnya dalam pembuatan kantor kepala desa, penetapan penerima beras raskin yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Seharusnya Kepala desa melakukan koordinasi yang efektif. Koordinasi sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya baik itu dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dan bisa mengevaluasi kegiatan pembangunan desa secara partisipatif. Kepala desa atau pemerintahan desa bekerja dengan efektif dan mengkoordinasikan nya dengan baik supaya tidak terjadi tumpang tindih sehingga dapat lebih mudah untuk menjalankan program-program atau pun tugas-tugas pemerintahan di desa tersebut.

Berdasarkan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas kecamatan Natal.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka harus di rumuskan masalahnya terlebih dahulu apa yang menjadi masalahnya, sehingga jelas dari mana yang harus di mulai perumusan masalah dilakukan agar penelitian.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini, maka dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas kecamatan Natal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas tanpa tanpa ada tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran yang di harapkan.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas kecamatan Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara ilmiah dan rasional tentang efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas kecamatan Natal
- 1.4.2 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan referensi bagi penelitian yang juga meneliti dengan judul yang sama khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara

1.4.3 Memberi kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas kecamatan Natal.

1.5 Sistematisa Penulisan

Pada penulisan proposal ini peneliti membuat suatu sistematisa dngan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu :

BAB I Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematisa penulisan

BAB II Menguraikan teori-teori yang relevan tentang efektivitas koordinasi vertikal Kepala Desa Di Desa Bintuas Kecamatan Natal

BAB III Pada bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan/narasumber, teknik pengumpulan data teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV Pada Bab ini berisikan tentang Penyajian Data, Deskripsi Hasil Wawancara dan Pembahasan pengolahan data sekaligus menyimpulkan.

BAB V Bab Penutup yang menyajikan Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut The Liang Gie dalam Setiawan (1998:6) mengemukakan definisi bahwa, “efektivitas yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang dikehendaki”.

Menurut Waluyo (2007:91) Efektivitas selalu di tekankan kepada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil, merupakan ciri utama organisasi yang efektif. Jika demikian halnya, maka efektivitas dalam organisasi birokrat dapat dilihat pula, bagaimana birokrasi itu merespon berbagai tuntutan lingkungan masyarakat yang menginginkan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan pelayanan publik atau dalam perkataan lain, birokrasi itu di tuntutan untuk lebih berorientasi kepada tuntutan pengguna jasa publik.

Menurut Purwaningsih dalam Setiawan (2010:6) Efektifitas dalam sudut pengguna adalah terpenuhinya keinginan dan harapan dari pencarian informasi yang mereka butuhkan.Sedangkan efektifitas dari sudut pandang perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan prosedur dan mekanisme operasional yang dibenarkan sehingga tercapai suatu kepuasan yang telah di tetapkan.

Menurut Irbiana (2016:03) Efektivitas adalah keselarasan hubungan antara output yang menjadi hasil sebuah program dengan sasaran yang menjadi tujuan bersama organisasi yang hendak dicapai. Jadi, inti dari efektivitas yaitu pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Menurut Nainggolan (2016:8) Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan dan capain-capain organisasi.

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Sutrisno (2011:125) Ada empat kelompok variable yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, ialah: a) Krekteristik organisasi, termasuk struktur organisasi; b) karakteristik lingkungan internal dan limgkungan eksternal; c)karekteristik karyawan; d) kebijakan praktik manajemen.

Menurut Gibson (1992:28) Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah: a) kemampuan, artinya kemampuan seseorang dalam dirinya, baik kemampuan teknik maupun kemampuan umum; b) keahlian, artinya kemampuan spesifik untuk menangani masalah teknik tertentu dalam pekerjaan; c) pengetahuan, artinya kemampuan yang diperoleh dan pengembangan diri

melalui penelusuran keilmuan; d) sikap, artinya kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku seseorang dengan sikap yang baik; e) motivasi, artinya suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan; f) stres, artinya tekanan yang timbul pada diri manusia seperti pekerjaan.

Handayani (2017: 17) efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat. Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam definisi efektivitas itu sendiri.

Menurut Steers (1985:8) Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu: a) karakteristik organisasi; b) karakteristik lingkungan; c) karakteristik pekerja; d) karakteristik manajemen.

2.1.3 Ukuran Efektivitas

Menurut Danim (2004:119) Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, ukuran efektivitas antara lain: a) jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran; b) tingkat keputusan yang diperoleh baik kualitas maupun kuantitas; c) produk kreatif, artinya hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja sehingga dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan; d) intensitas yang dicapai.

Menurut Siagian (2001:24) Ukuran efektivitas yaitu:

- a. kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran. Sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi;
- c. proses analisis dan keputusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya kebijakan harus mampu menjabatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
- d. perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan;
- e. penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Sebab apa bila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja;
- f. tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasaran yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
- g. pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dileksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut

tidak akan mencapai tujuan dan sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuan;

- h. sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.1.4 Kriteria Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Handayani (2017:13) kriteria efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber daya yang ada.

Menurut Rihardini (2012:15) ukuran efektivitas yaitu;

- a. pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Sebuah program dikatakan efektif jika telah teapat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

- b. adaptasi adalah kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah pengisian tenaga kerja sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dari pelaksana program itu sendiri. Peran aktif dari pelaksana program juga termasuk di dalam adaptasi program, agar tujuan dari sebuah program dapat tercapai secara maksimal. Serta adanya tanggapan program dari lingkungan luar seperti keinginan sasaran, dan kualitas dari program itu sendiri. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
- c. integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sosialisasi di sini merupakan sosialisasi secara langsung dengan bertatap muka atau dengan menggunakan perantara misalnya baleho, atau dengan menggunakan pamflet. Proses sosialisasi ini mempunyai tujuan agar program yang berjalan dapat diketahui oleh masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat tujuan adanya program tersebut.

2.2 Konsep Koordinasi Vertikal

2.2.1 Pengertian koordinasi

Menurut Anggara dan Sumarti (2016:213) Koordinasi adalah proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antara kegiatan, baik itu kegiatan fisik kegiatan rohaniah.

Menurut Stoner dan Wankel dalam Anggara dan Sumantri (1986:214) Koordinasi adalah penyatu paduan tujuan dan kegiatan dari unit - unit (bagian atau bidang fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien.

Menurut Hasibuan (2011:85) Koordinasi adalah kegiatan yang menggerakkan, meningkatkan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan paruh bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Handoko (2003:195) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:85) Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu pengintegrasian tujuan-tujuan dan satuan yang telah

ditetapkan, suatu proses pengembangan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Prinsip koordinasi

Menurut Abdulrachmad dalam Anggara dan Sumantri (1979:214-215) Prinsip – prinsip koordinasi, yaitu : a) Efesien, b) Kesatuan arah dan tujuan (konvergensi) c) Pervasivitas, memasuki segenap kegiatan manajemen pelaksanaan, d) Ketetapan penggunaan alat koordinasi, e) Koordinasi yang strategis.

Menurut Sagandha dalam Anggara dan Sumantri (1991:215) Prinsip koordinasi yaitu: a) Kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama; b) Kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak., termasuk termasuk target dan jadwalnya; c) Ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan; d) Saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai kegiatan dan hasinya pada saat tertentu, termasuk masalah yang dihadapi masing-masing; e) Coordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama; f) Informasi dari berbagai pihak yang mengalir pada koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak; g) Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

2.2.3 Syarat – Syarat Koordinasi

Menurut Tripathi dan Reddy dalam Anggara dan Sumantri (1983:215) Syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu: a) Hubungan langsung; b) Kontinuitas; c) Kesepakatan awal; d) Dinamisme; e) Tujuan yang jelas; f) Organisasi yang sederhana; g) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; h) Komunikasi yang efektif; i) Kepemimpinan dan supervise yang efektif.

Menurut Hasibuan dalam Anggara dan Sumantri (2001:88) Syarat koordinasi adalah sebagai berikut: a) *Sense on cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), Hal ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang; b) *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antar bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan; c) *Team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai; d) *Esprit de corp*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau di hargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

2.2.4 Manfaat Koordinasi

Menurut Sutarto dalam Azhari (2002:146) ada beberapa manfaat yang dapat dipetik organisasi didalam melakukan koordinasi yaitu : a) Dapat menghindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satauan-satuan organisasi atau para pejabat yang ada dalam organisasi; b) Dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa suatu organisasinya atau jawabannya merupakan paling penting; c) Dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama; d) Dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas; e) Dihindarkan

kemungkinan terjadi kesamaan pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan – satuan organisasi; f) Dihindarkan kemungkinan timbulnya petentangan antar suatu organisasi atau pejabat; g) Dihindarkan kemungkinan terjadi kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas; h) Timbulnya kesadaran para pejabat untuk saling membantu satu sama lain; i) Adanya kesatuan sikap antar pejabat; j) Adanya kesatuan kebijakan antar pejabat; k) Adanya kesatuan langkah antar pejabat; l) Adanya kesatuan tindakan antar pejabat.

Menurut Hasibuan dalam Azhari (2006:86) manfaat koordinasi yaitu : a) Mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan; b) Agar orang – orang dan pekerjaannya di selaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi; c) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan; d) Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing – masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi; e) Semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Jika koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan organisasi.

2.2.5 Sifat Koordinasi

Menurut Hasibuan dalam Azhari (2006:87) sifat koordinasi adalah: a) Koordinasi bersifat dinamis bukan statis; b) Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh kordinator dalam rangka pencapaian sasaran; c) Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan, asas koordinasi adalah asas skala (*scalar principle hieraki*) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang

berbeda satu sama lain. Asas hirarki ini merupakan setiap atasan (kordinator) harus mengkoordinasi bawahannya secara langsung. *Scalar principle* merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

2.2.6 Cara – Cara Mengadakan Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011:88) cara – cara mengadakan koordinasi adalah: a) memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan – tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik; b) mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing – masing individu anggota dengan tujuannya sendiri – sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama; c) mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran – saran, dan lain sebagainya; d) mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran; e) membina *human Relation* yang baik antara sesama pegawai; f) manajer sering melakukan komunikasi informasi dengan paara bawahan. Ringkasnya, suatu koordinasi akan lebih baik jika memperoleh dukungan.

2.2.7 Masalah – Masalah Pencapaian Koordinasi Yang Efektif

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi kepala desa unruk mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan dari satuan – satuan yang berbeda.

Menurut Lawrence dan Lorch dalam Handoko (2003:197) empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja diantara bermacam-macam individu dan

departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian – bagian organisasi secara efektif yaitu:

- a. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik;
- b. Perbedaan dalam orientasi waktu, kepala desa akan lebih memperhatikan masalah – masalah yang harus di pecahkan segera atau dalam periode waktu pendek;
- c. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi, kegiatan memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar;
- d. Perbedaan dalam formalitas struktur, setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai mempunyai metode – metode dan standar- - standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi pegawai.

2.2.8 Pendekatan – Pendekatan Untuk Pencapaian Koordinasi Yang Efektif

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidak pastian tugas yang di koordinasi, semakin membutuhkan informasi. Untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi.

Menurut Hasibuan (2003:198) ada 3 pendekatan pencapaian koordinasi yang efektif: a) Mempergunakan teknik – teknik manajemen dasar (hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan – kegiatan serta aturan – aturan dan prosedur – prosedur; b) Meningkatkan koordinasi potensial

(investasi dalam sistem informasi vertikal dan menciptakan hubungan – hubungan kesamping); c) Mengurangi kebutuhan akan koordinasi (penciptaan sumber daya tambahan dan penciptaan tugas – tugas yang dapat berdiri sendiri).

2.2.9 Koordinasi Vertikal

Menurut Tosi dan Carrpll dalam Anggara dan Sumarti (1982:217) Koordinasi vertikal yaitu menunjukkan pengembangan hubungan yang efektif dan disatupadukan antar-kegiatan pada tingkat organisasi yang berlainan, contoh nya, persetujuan mengenai pengeluaran modal pada tingkat wakil direktor dikoordinasikan dengan penyerahan dan penerimaan pelengkapan modal pada tingkat pelaksanaan.

Menurut Handayani dalam Anggara dan Sumarti (1991:217) Koordinasi vertikal yaitu antar pihak yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis. Koordinasi bersifat hierarkis karena satu dan lainnya berada pada satu garis komando (*line of command*). Misalnya, koordinasi yang dilakukan oleh kepala direktur yang berada dalam lingkungan direktoratnya.

Menurut Hasibuan dalam Deswimar (2009: 86-87) Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabannya. Tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan oleh pemimpin atau kepala desa karena kepala desa bisa memberi sanksi terhadap aparat atau pegawai yang susah di atur.

Berdasarkan uraian diatas, koordinasi vertikal adalah koordinasi yang menunjukkan pembangunan hubungan antara unit-unit dalam suatu organisasi dengan begitu akan menimbulkan hasil yang lebih efektif didalam organisasi tersebut.

2.3 Kepala Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Menurut Hidayati (2018:5) Kepala desa sebagai badan pelaksana kebijakan desa adalah orang pertama yang bergerak, menuntun, menggerakkan orang lain dan mempengaruhi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desatertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Menurut Azhari (2017:550) Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam membuat peraturan desa ataupun dalam mengambil suatu keputusan, harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui BPD serta kepala desa merupakan wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Welly (2013:33) Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan uraian diatas, kepala desa adalah orang nomor satu di desa, yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan desa.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan wewenang kepala desa adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skal produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;

- j. mengusulkan dan penerimaan pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

2.3.3 Peranan Kepala Desa

Menurut Welly (2013:34) Peran kepala desa yaitu :

- a. Inisiatif/inisiator, yaitu orang yang membuat langkah pertama mengusahakan sesuatu. Jadi, kepala desa disini sebagai inisiator yaitu langkah pertama seorang kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama dalam membangun dan memajukan desa;
- b. Motivasi/motivator, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang di berikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang di motivasikan secara kritis, rasional dan tanggung jawab;
- c. Fasilitator, adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami

atau memecahkan masalah bersama – sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat atau pendapat;

- d. Mobilisasi/mobilisator, yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi, kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat umum lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang pemerintahan desa bab IV paragraph 2 pasal 14, kepala desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka kepala desa mempunyai fungsi yaitu: a) Menggerakkan potensi masyarakat; b) Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya; c) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa; d) Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.3.4 Desa

Menurut Widjaja dalam Azhari (2003:90) Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di

dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

Berdasarkan uraian diatas, desa adalah suatu wilayah yang ditempati masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan dikepalai oleh kepala desa.

2.3.5 Wewenang Desa

Menurut Undang – Undang No.6 tahun 2014 Tentang desa kewenangan desa adalah : a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) Kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis pengolahan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan melalui cara menggambarkan keadaan objek peneliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan alasan untuk mengetahui fakta yang menjadi variable telah berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Arikunto (2010:03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

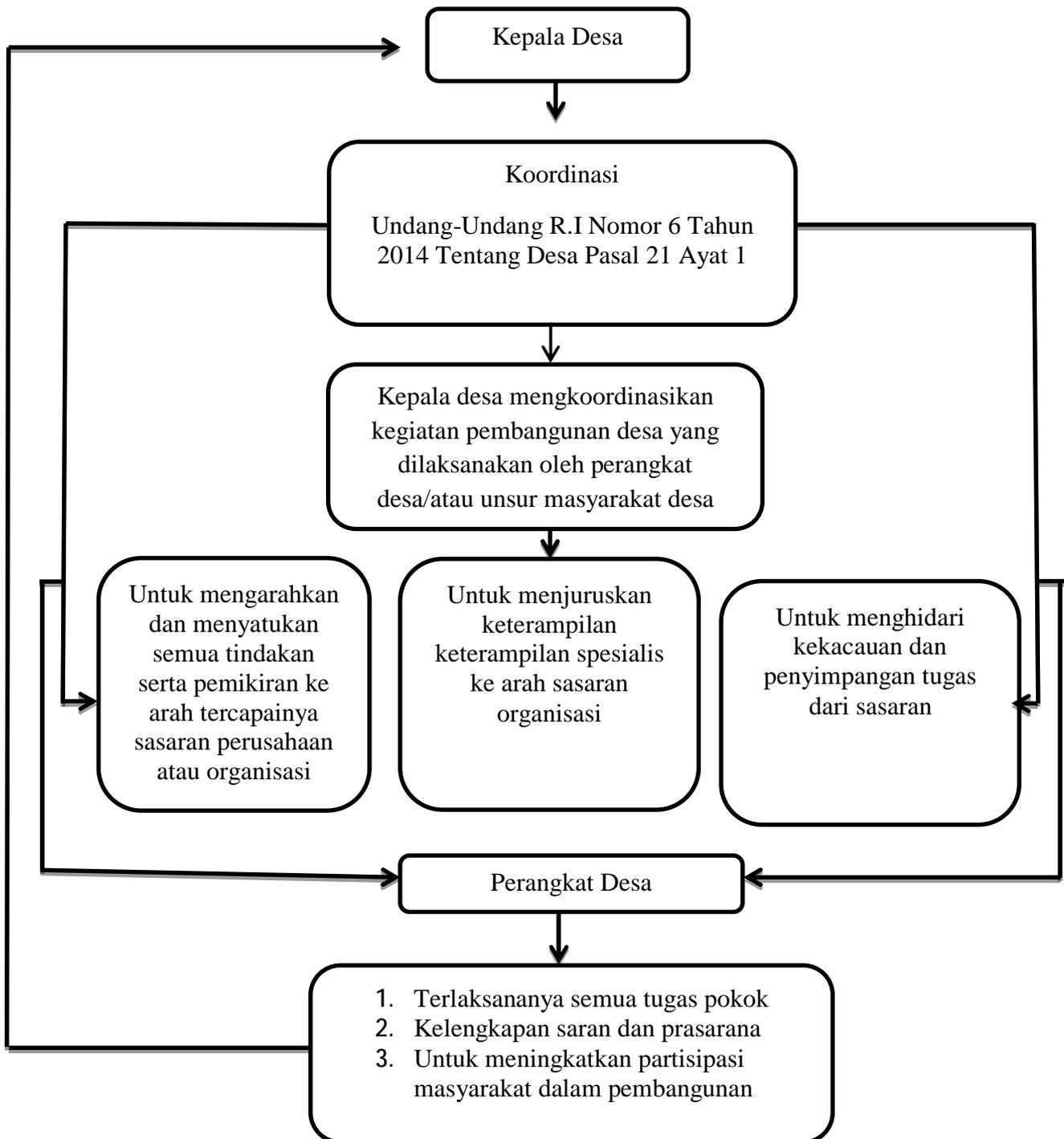
Menurut Moleong (2012:05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut karena peneliti ingin melihat dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada Efektivitas Koordinasi Vertikal Kepala Desa Di Desa Bintuas Kecamatan Natal. Dengan demikian peneliti berharap bisa mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat secara baik dan benar, untuk menggambarkan bagaimana efektivitas koordinasi vertikal Kepala Desa di Desa Bintuas Kecamatan Natal.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang akan diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan kata lain, penulis berupaya membawa para pembaca hasil penelitian ini untuk memaknai konsep sesuai dengan yang diinginkan dan dimaksudkan oleh penulis. Konsep yang akan dibahas dalam penelitian Efektivitas Koordinasi Vertikal Kepala Desa Di Desa Bintuas Kecamatan Natal. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut.

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Adapun Defenisi konsep dalam penelitian antara lain:

- 3.3.1 efektivitas merupakan pemanfaatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan dan capain-capain organisasi
- 3.3.2 koordinasi merupakan suatu pengintegarsian tujuan-tujuan dan satuan yang telah ditetapkan, suatu proses pengembangan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
- 3.3.3 Kepala desa merupakan kepa orang nomor satu di desa, yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan desa.
- 3.3.4 Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan dikepalai oleh kepala desa.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Adapun kategorisasi dari penelitian adalah:

- 3.4.1 Adanya perencanaan yang baik, efektif tidaknya suatu kegiatan didasari pada perencanaan yang baik. Apabila perencanaannya baik maka kegitanan (koordinasi) itu akan efektif.

- 3.4.2 Adanya kejelasan strategi pencapaian tujuan, karna dalam melakukan sebuah kegiatan harus didasari dengan strategi pencapaian tujuan yang baik supaya apa yang diinginkan bisa tercapai dengan baik.
- 3.4.3 Adanya pengarahan langsung dari atasan kepada bawahan, kepala desa mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi kepada perangkat desa dalam mencapai tujuan bersama.
- 3.4.4 Adanya kerja sama, di dalam koordinasi vertikal antara kepala desa dengan perangkat desa harus memiliki kerja sama yang baik agar koordinasinya dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan bersama.

3.5 Narasumber

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari informasi atau narasumber adalah orang yang berkaitan langsung dengan koordinasi vertikal Kepala Desa Di Desa Bintuas Kecamatan Natal :

3.5.1 Narasumber 1

Nama : Rasdan
Usia : 45 Tahun
Tingkat pendidikan : SMA
Jenis kelamin : Laki - laki
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Desa

3.5.2 Narasumber 2

Nama : Yuliani Nst
Usia : 33 Tahun

Tingkat pendidikan : SMA
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris Desa

3.5.3 Narasumber 3

Nama : Rahmudin Nst
Usia : 35 Tahun
Tingkat pendidikan : SMA
Jenis kelamin : Laki - laki
Pekerjaan/ Jabatan : Kaur keuangan

3.5.4 Narasumber 4

Nama : Lisardo S.E
Usia : 27 Tahun
Tingkat Pendidikan : S1
Jenis kelamin : Laki - laki
Pekerjaan/ Jabatan : Kaur pembangunan

3.5.5 Narasumber 5

Nama : Ratna Sari
Usia : 30 Tahun
Tingkat pendidikan : SMA
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Jabatan : Kaur kesejahteraan masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait topik penelitian.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, ,maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber daya yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menapsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar

peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan efektivitas koordinasi vertikal Kepala Desa Di Desa Bintuas Kecamatan Natal dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang di kembangkan oleh Miles dan Humberman

3.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajiakn data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8 4. Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.8.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu penulis melakukan penelitian ini pada bulan januari sampai maret 2019.

3.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bintuas Kecamatan Natal jalan lintas pantai barat, Provinsi Sumatera Utara.

3.9 Deskripsi Ringkasan objek penelitian

3.9.1 Visi dan Misi

Visi

Terbangun tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Bintuas yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. meminimalisir unsur pembodohan dan penindasan di desa bintuas.

Misi

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi dasa baik darat maupun kelautan serta perikanan.
- c. Meningkatkan mutu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Fungsi kepala desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karantaruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya tugas kepala desa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sekretaris Desa

Sekretaris desa berfungsi membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi sekretaris desa

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkatb desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, perivikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program-program serta penyusunan laporan.

Kaur Keuangan

Tugas kaur keuangan Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD.

Fungsi kaur keuangan :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
- b. persiapan bahan penyusunan APBD
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretari desa

Kaur Pembangunan

Tugas kaur pembangunan

- a. Memantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- b. Membantu membina perekonomian desa
- c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembnagunan desa
- d. Pengendalian dan pemanfaatan potensi desa

Fungsi kaur pembangunan

- a. Penyiapan bantuan analisis dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pelakksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan intenverisasi potensi desa
- e. Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahakan oleh kepala desa
- f. Pendataan perkembangan pembangunan di desa.

Kaur Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Sersa)

Tugas kaur kesejahteraan masyarakat yaitu membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan-bahan dalam perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi kaur kesejahteraan masyarakat :

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa
- e. Selain dari tugas yang diberikan oleh kades, perangkat desa bagian kesra ini juga harus bisa bekerja sama dengan sekretaris desa untuk melancarkan administrasi sosial kemasyarakatan yang ada

Kaur Pemerintahan

Tugas kaur pemerintahan yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijaksanaan dalam penyusunan produksi hukum desa.

Fungsi kaur pemerintahan :

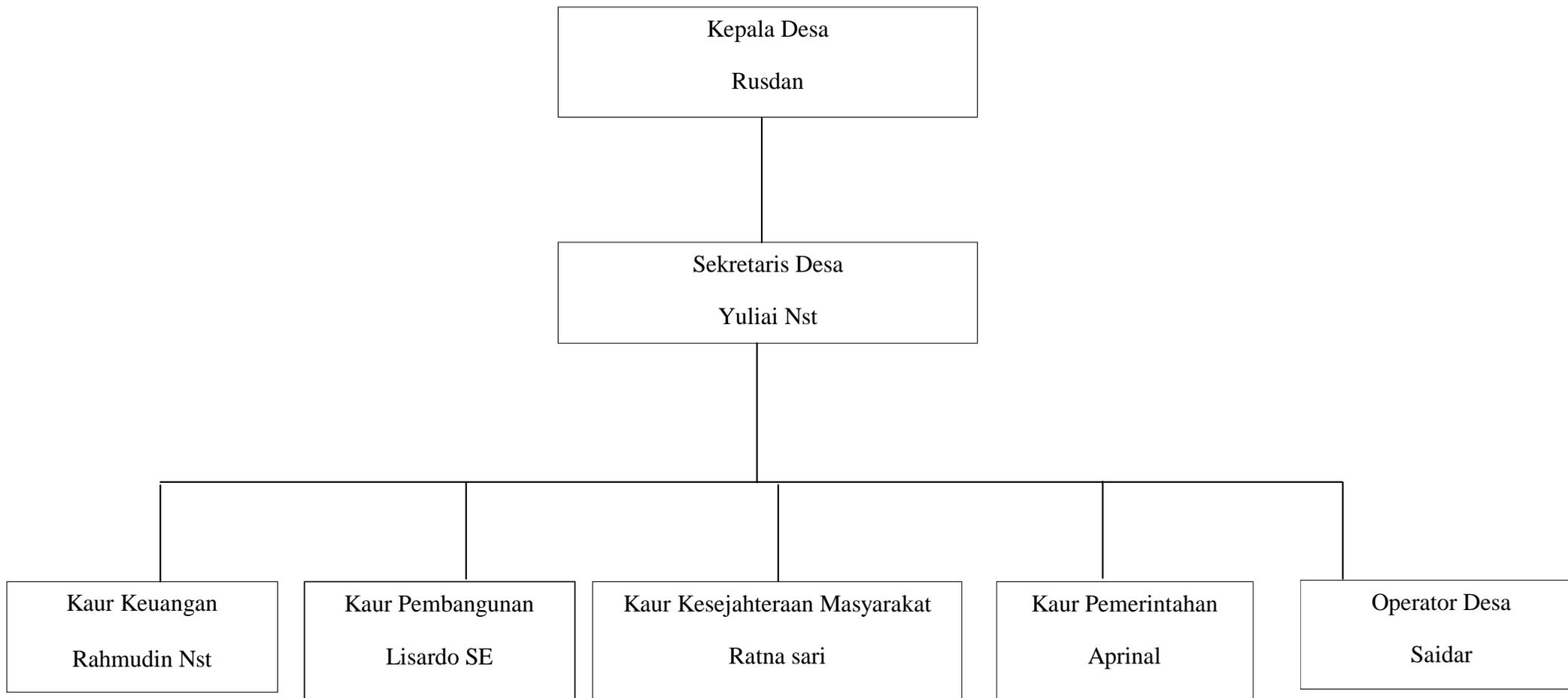
- a. Sebagai pelaksana kegiatan administrasi kependudukan
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
- e. Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil
- g. Menjadi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

Operator Desa

Tugas operator desa yaitu membuat pengajuan, penata usahaan dan membuat pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintahan pusat serta mengoperasikan komputer untuk kebutuhan desa seperti mengentri data kependudukan kedalam aplikasi, menjadi notulen pada setiap pertemuan dan rapat di desa serta menyimpan arsip baik berupa data maupun multimedia.

3.9.2 Struktur Organisasi

GAMBAR 3.2
Struktur organisasi pemerintahan desa Bintuas Kecamatan Natal



Sumber : Kantor Kepala Desa Bintuas Kecamatan Natal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan, dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudia ditarik kesimpulan. Analisis ini berfokus pada efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di Desa Bintuas Kecamatan Natal.

Untuk mendukung perolehan data selain data primer yang diperoleh dilapangan melalui wawancara secara langsung oleh narasumber di kantor Desa Bintuas Kecamatan Natal. Maka selanjutnya juga diperoleh data sekunder dalam pembantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber seperti data – data berupa dokumen, arsip dari referensi lainnya yang di peroleh dari kantor Desa Bintuas Kecamatan Natal. Data – data yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di Desa Bintuas Kecamatan Natal dapat terjawab dan dianalisis. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat dan metode peneltian deskripsi kualitatif.

4.1.1. Distribusi Narasumber

Table 4.1
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki – Laki	3	60 %
2.	Perempuan	2	40 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Distribusi berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 3 orang atau sebesar 60 %, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau sebesar 40 %.

Table 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	20 – 29 tahun	1	20 %
2.	30 - 39 tahun	3	60 %
3.	40 – 49 tahun	1	20 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Distribusi narasumber menurut umur dari 5 narasumber mayoritas berumur 30 – 39 tahun sebanyak 3 orang sebesar 60 %, sedangkan yang berumur 20 – 29 tahun dan 40 – 49 tahun masing – masing sebanyak 1 orang sebesar 20 %.

Table 4.3
Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	4	80 %
2.	S – 1	1	20 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan data di atas, yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang atau sebesar 80 % dan yang berpendidikan S-1 sebanyak 1 orang atau sebesar 20 %. Jadi, berdasarkan hasil data di atas dapat dikatakan narasumber yang paling dominan berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu SMA.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1 Adanya perencanaan yang baik

Ukuran efektivitas salah satunya adanya perencanaan yang baik, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rasdan selaku kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan koordinasi vertikal tidak ada perencanaan secara khusus yang adahanyaarahan-arahan biasa saja dan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam melakukan koordinasi vertikal, terkait dengan perencanaan

pembangunan di desa pemerintahan desa memusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat setelah itu dibuat perencanaannya dan kendala yang dihadapi pada saat ini kurangnya rasa tanggung jawab sesama perangkat desa dan untuk mengatasi kendala itu, saya berupaya melakukan komunikasi dengan baik dengan perangkat desa dalam bentuk penyadaran dan kepedulian serta memberi sanksi, apabila tidak ada perubahan maka saya akan menggantinya dengan yang lain.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuliani Nst ini selaku sekretaris desa di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Jumat, 08 Februari 2019 yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada perencanaan khusus didalam melakukan koordinasi vertikal, yang ada hanya mempersiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan, terkait dengan perencanaan pembangunan sebelum membuat perencanaan pemerintahan desa memusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat lalu pemerintahan desa menyimpulkan hasil dari musyawarah tersebut dan setelah itu pemerintahan desa melakukan koordinasi, kendala yang dihadapi saat ini yaitu kurangnya komunikasi yang dilakukan sesama perangkat desa dan untuk mengatasi kendala tersebut menurut saya harus memperbaiki komunikasi diantara perangkat desa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmudin Nst selaku kaur keuangan di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Jumat, 08 Februari 2019 mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan koordinasi vertikal tidak ada perencanaannya. Akan tetapi dalam hal pembangunan pemerintahan desa membuat perencanaannya yaitu pertama-tama pemerintahan desa melakukan musyawarah dengan masyarakat setelah mendapatkan hasil musyawarah dengan masyarakat lalu pemerintahan desa mengkoordinasikan lagi didalam pemerintahn desa setelah itu baru dirumuskan perencanaannya. Kendalanya terkadang ada beberapa perangkat desa yang tidak hadir dikarenakan kendala tertentu. Apabila alasannya tidak jelas maka harus diberi sanksi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Lisardo SE selaku kaur pembangunan desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Jumat, 08 Februari 2019 mengatakan bahwa :

“Tidak ada perencanaan dalam melakukan koordinasi vertikal, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa pemerintahan desa terlebih dahulu membuat perencanaannya agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Di dalam membuat perencanaan pemerintahan desa terlebih dahulu bermusyawarah dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, setelah mendapatkan kesimpulannya lalu pemerintahan desa mengkoordinasikan lagi dengan didalam pemerintahan desa, kendala yang terkadang dihadapi yaitu tidak seluruh perangkat desa hadir dan mengatasi hal itu kepala desa biasanya memberi teguran kepada perangkat desa yang tidak hadir karena alasan yang tidak jelas”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna Sari selaku kaur kesejahteraan masyarakat desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Jumat, 08 Februari 2019 mengatakan bahwa :

“Di dalam melakukan koordinasi vertikal tidak ada perencanaan yang dibuat. Mengenai perumusan perencanaan pembangunan pemerintahan desa selalu memusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut yang menjadi landasan dalam membuat perencanaan pembangunan. Terkait dengan kendala yang dihadapi yaitu ketidakdisiplinan perangkat desa dalam hal kehadiran dan kurangnya komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut kepala desa harus mengaktifkan komunikasi dengan baik terhadap bawahannya dan menegur bawahan yang tidak hadir atau memberi sanksi kepada bawahannya.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa kepala desa tidak ada melakukan perencanaan secara khusus dalam melakukan koordinasi vertikal, yang ada hanya pengarahan secara langsung ketika akan melakukan koordinasi. Dan dalam perencanaan pembangunan perangkat desa terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat setelah mendapatkan hasil musyawarah tersebut maka hasil tersebut akan menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan. Terkait dengan kendala yang dihadapi kurangnya komunikasi sesama perangkat desa. Untuk mengatasi kendala tersebut kepala desa harus lebih aktif melakukan komunikasi dengan perangkat desa dan begitu juga sebaliknya.

4.2.2 Adanya strategi pencapaian tujuan

Ukuran efektivitas salah satunya adalah adanya kejelasan strategi pencapaian tujuan, di ketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rasdan selaku kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang mengatakan bahwa :

“Strategi yang saya lakukan adalah dengan menjalin komunikasi yang lebih baik, pengarahan yang terukur, target pencapaian yang jelas, manajemen yang baik dan mendekatkan diri dengan para perangkat desa agar dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan ketika saya melakukan koordinasi suasana yang tercipta tidak kaku lagi. Dalam hal pembangunan yang saya lakukan yaitu dengan memberikan tugas kepada perangkat desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan selalu memantau pekerjaan mereka agar tidak ada kendala yang dihadapi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuliani Nst selaku sekretaris desa di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Jumat, 08 Februari 2019 yang mengatakan bahwa :

“Dalam meningkatkan koordinasi strategi yang saya lakukan dengan memberikan arahan kepada kaur-kaur desa agar lebih aktif lagi pada saat melakukan koordinasi agar koordinasi tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Tetapi terkadang para kaur kurang berpartisipasi dalam koordinasi misalnya tidak ada tanggapan maupun masukan pada saat melakukan koordinasi.

Oleh sebab itu, saya memberikan sedikit motivasi agar para kaur desa lebih aktif lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmudin Nst selaku kaur keuangan desa di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Jumat, 08 Februari 2019 yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya strategi yang harus dilakukan tidak ada, di karenakan saya hanya menunggu arahan dari kepala desa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lisardo SE selaku kaur pembangunan desa di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Jumat, 08 Februari 2019 yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya dalam meningkatkan koordinasi vertikal strategi yang dilakukan yaitu dengan adanya peningkatan komunikasi yang baik antara perangkat desa serta pelaksanaan yang baik dan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan tertentu. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya komunikasi antara perangkat desa serta pelaksanaan yang kurang maksimal, sehingga hal tersebut harus ditingkatkan supaya hal-hal tersebut jangan terulang lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna Sari selaku kaur kesejahteraan masyarakat di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Jumat, 08 Februari 2019 yang mengatakan bahwa :

“Tidak ada strategi dari saya dalam meningkatkan koordinasi vertikal, yang pasti komunikasi sesama perangkat harus berjalan dengan baik.”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya strategi pencapaian tujuan, strategi yang dilakukan

kepala desa adalah dengan meningkatkan komunikasi yang baik, pengarahan yang terukur, manajemen yang baik serta target penacapaian yang jelas. Didalam menjalankan strategi kaur – kaur desa hanya menunggu perintah atau arahan dari kepala desa. Kendala yang di hadapi yaitu kurang partisipasi dari perangkat desa serta komunikasi yang kurang baik. Untuk mengatasi kendalanya yaitu dengan menciptakan suasana kekeluargaan di kantor kepala desa.

4.2.3 Adanya pengarahan langsung dari atasan kepada bawahan

Koordinasi vertikal salah satu adanya pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit, tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rasdan selaku kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang mengatakan bahwa :

“Pengarahan yang saya lakukan adalah pengarahan secara langsung terhadap perangkat desa, untuk melakukan pengarahan tidak ada langkah-langkah strategi khusus yang ada hanya memberikan pengarahan langsung dengan perangkat desa, terkait dengan kendala yang di hadapi kurangnya motivasi perangkat desa dalam menjalankan tugas yang diberikan. Untuk mengatasinya saya memberikan motivasi kepada perangkat desa agar memiliki rasa menyukai terhadap pekerjaannya serta menciptakan suasana lingkungan kerja yang dapat mendukung motivasi dan prestasi kerja perangkat desa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuniani Nst selaku sekretasi desa di desa Bintuas pada hari jumat 08, februari 2019 yang menyatakan bahwa :

“Pengarahan yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan koordinasi vertikal adalah secara langsung, dalam melakukan pengarahan kepala desa tidak melakukan langkah-langkah strategi dalam melakukan pengarahan tentang koordinasi, terkait dengan kendalanya yaitu kurang aktifnya komunikasi kepala desa dengan perangkat desa sehingga terkadang koordinasinya tidak berjalan efektif, untuk mengatasi kendala tersebut saya harap kepala desa harus lebih aktif komunikasinya dengan perangkat desa dan perangkat-peranngkat lainnya harus lebih aktif komunikasi dengan kepala dengan begitu akan lebih memudahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmudin Nst selaku kaur keuangan desa Bintuas pada hari jumat 08 februari 2019 yang mengatakan bahwa :

“Bentuk pengarahan yang dilakukan kepala desa adalah pengarahan secara langsung, dan mengenai apakah pernah kepala desa memberikan langkah-langkah strategi kepada bawahannya tidak pernah, yang ada hanya arahan-arahan yang dilakukan kepala desa, terkait dengan kendalanya menurut saya kurangnya komunikasi sesama perangkat desadikarenakan perangkat desa sibuk dengan kegiatan masing-masing untuk mengatasi kendala tersebut perangkat desa harus lebih aktif berkomunikasi dengan sesama perangkat supaya pengarahan yang dilakukan berjalan maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Lisardo SE selaku kaur pembangunan desa Bintuas pada hari jumat 08 februari 2019 yang mengatakan bahwa :

“Bentuk pengarahan yang dilakukan secara langsung dan terkadang kepala desa menjumpai perangkat satu persatu, untuk melakukan pengarahan kepala desa tidak pernah memberikan langkah-langkah strategi, terkait kendala tidak terjadwalnya agenda-agenda internal perangkat desa, dikarenakan tidak aktifnya komunikasi sesama perangkat. untuk mengatasi Kendala tersebut kepala desa harus lebih mengaktifkan komunikasi dengan perangkat desa dan perangkat desa begitu juga supaya agenda-agenda internal atau koordinasi vertikal yang dilakukan berjalan maksimal”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna Sari selaku kaur kesejahteraan masyarakat desa Bintuas pada hari jumat 08 februari 2019 mengatakan bahwa :

“Bentuk pengarahan yang dilakukan secara langsung, tidak ada langkah-langkah strategi yang dilakukan kepala desa, terkait kendalanya saat ini adalah kurang aktifnya komunikasi sesama perangkat desa, untuk mengatasi kendala tersebut kepala desa harus lebih aktif berkomunikasi dengan perangkat desa dan begitun juga sebaliknya supaya koordinasi vertikal berjalan dengan baik”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa bentuk pengarahan yang dilakukan kepala desa adalah pengarahan seacara langsung kepada perangkat desa dan terkait dengan apakah pernah memberikn langkah-langakh strategi kepada bawahannya kepala desa

tidak pernah memberikan langkah-langakahn strategi, Kendala yang dihadapi kurangnya motivasi dan komunikasi sesama perangkat desa sehinga sering terjadi kesalah pahaman antara kepala desa dengan perangkatnya untuk mengatasi Kendala tersebut kepala desa harus lebih aktif berkomunikasi langsung dengan perangkat dan memberikan motivasi agar perangkat desa bisa mencintai pekerjaannya dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

4.2.4 Adanya kerja sama

Koordinasi vertikal salah satunya adanya kesatuan-kesatuan kerja atau adanya kerja sama yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan oleh pemimpin atau kepala desa karena kepala desa bisa memberi sanksi terhadap aparat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rasdan selaku kepala desa Bintuas pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang mengatakan bahwa :

“Bentuk kerja samanya yaitu kerukunan, saling menghargai sesama perangkat desa dalam menjalankan tugas., caranya adalah dengan lebih memahami keadaan maupun situasi dan kondisi lingkungan kerja. Serta menciptakan lingkunga kerja yang harmonis. Kendalanya yaitu diantara perangkat saling mencurigai satu sama lain. Cara mengatasinya yaitu dengan menciptakan keterbukaan antara perangkat desa supaya tidak saling mencurigai sesama perangkat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuliani Nst selaku sekretaris desa di desa Bintuas pada hari Jumat, 08 Februari 2019 yang menyatakan bahwa :

“Bentuk kerja sama dengan bergotong royong dan saling tolong menolong antara perangkat desa, cara melaksanakannya dengan bersama-sama supaya bisa mencapai hasil yang maksimal, terkait kendala kurang disiplin, komunikasi dan kepedulian untuk memulai, untuk mengatasi kendala tersebut kepala desa harus menegaskan pada bawahannya harus disiplin dengan tugasnya masing-masing.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmudin Nst selaku kaur keuangan desa di desa Bintuas pada hari Jumat, 08 Februari 2019 yang menyatakan bahwa :

“Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah bentuk kerukunan dengan begitu kepala desa gampang mengontrol perangkat-perangkatnya, pemerintahan desa melakukannya dengan bersama-sama dan ketika ada masalah didalam pemerintahan desa kami akan melakukan koordinasi terkait dengan masalah tersebut, terkait dengan kendala saat ini kurang nya kominukasi, untuk mengatasinya menurut saya sesama perangkat harus aktif komunikasinya supaya tidak terjadi kebingungan-kebingungan dalam menjalankan tugas dan juga kerja samanya berjalan dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lisardo SE selaku kaur pembangunan desa di desa Bintuas pada hari jumat, 08 februari 2019 yang menyatakan bahwa :

“Bentuk kerja samanya secara bersama-sama atau gotong royong, cara melakukan nya adalah melakukan secara bersama dengan tugas-tugas yang telah diberikaan, misalnya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan koordinasi terkait dengan kendala kurangnya komunikasi dalam melakukan atau menjalankan tugas-tugas untuk mengatasi kendala-kendala tersebut kepala desa harus lebih mendesiplikan perangkatnya dan lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugas nya, supaya apa yang dikoordinasikan itu bisa dilaksanakan dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna Sari selaku kaur kesejahteraan masyarakat desa di desa Bintuas pada hari jumat, 08 februari 2019 yang menyatakan bahwa :

“Tidak ada bentuk kerja sama secara teratur. Akan tetapi didalam lingkungan kantor kami sesama perangkat desa saling menghormati, tolong menolong dan lain-lain. Tidak ada kendala yang dihadapi.”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja samanya adalah bentuk kerukunan, saling menghargai sesama perangkat desa.caranya adalah dengan lebih memahami keadaan maupun situasi dan kondisi lingkungan kerja. Serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan begitu akan membuat kerja sama yang baik, terkait dengan kendalanya masih kurang komunikasi kepala desa dengan perangkat desa sehingga sering terjadi tidak maksimalnya kerja-kerja pemerintahan desa dan untuk mengatasi kendala tersebut kepala desa harus berperan aktif di dalam perangkat supaya tidak terjadi lagi kesah pahaman dengan tugas-tugas tiap perangkat.

4.3 Pembahasan

Pada bagian ini dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yaitu tentang Efektifitas koordinasi vertikal kepala desa di Desa Bintuas Kecamatan Natal.

4.3.1 Adanya Perencanaan Yang Baik

Menurut Siagian (2001:24) Ukuran efektivitas salah satunya adanya perencanaan yang baik, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan. setiap pelaksanaan kegiatan harus mampu merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan memegang peran penting didalam suatu organisasi. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan luar yang berubah-ubah.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa perencanaan yang dilakukan yang dilakukan kepala desa Bintuas Kecamatan Natal terhadap perangkat desa dalam menjalankan koordinasi vertikal tidak ada, namun dalam melaksakan koordinasi vertikal kepala desa memberikan arahan secara langsung tanpa adanya perencanaan.

Sebagaiman diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di kantor kepala desa Bintuas Kecamatan Natal dalam kaitannya

dengan hasil wawancara tentang koordinasi vertikal kepala desa, tidak adanya perencanaan yang dibuat dalam melaksanakan koordinasi vertikal yang ada hanya memberi arahan secara langsung hal ini dapat dibuktikan dengan data wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Bapak Rasdan, Ibu Yuliani Nst, Bapak Rahmudin Nst, Bapak Lisardo dan Ibu Ratna Sari pada 07-08 februari 2019 selaku kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur pembangunan dan kaur kesejahteraan masyarakat desa Bintuas Kecamatan Natal yang mengatakan bahwa tidak adanya perencanaan dalam melaksanakan koordinasi vertikal.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa tidak adanya perencanaan di dalam koordinasi vertikal kepala desa di Desa Bintuas Kecamatan Natal. Dikarenakan hanya pengarahan secara langsung saja yang dilakukan kepala desa dalam melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya serta kurangnya komunikasi yang dilakukan sesama perangkat desa, itulah yang menjadi kendala kepala desa ketika akan melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya. Untuk mengatasi kendala tersebut kepala desa harus lebih aktif melakukan komunikasi dengan perangkat desa dan begitu juga sebaliknya.

Dan dalam perencanaan pembangunan perangkat desa terlebih dahulu mengumpulkan beberapa perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah membahas mengenai pembangunan yang akan di lakukan di desa Bintuas Kecamatan Natal. Setelah mendapatkan hasil musyawarah tersebut maka hasil tersebut akan menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan yang akan di lakukan di desa Bintuas Kecamatan Natal.

4.3.2 Adanya strategi pencapaian tujuan

Menurut Siagian (2001:24) Ukuran efektivitas salah satunya adalah adanya kejelasan strategi pencapaian tujuan, di ketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran.

Menurut Siagian (2001:24) Ukuran efektivitas salah satunya adalah adanya tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan juga organisasi dapat tercapai

Menurut Danim (2004:119) Adanya kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, ukuran efektivitas antara lain :a) jumlah hasil yang di keluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran; b) tingkat kepuasan yang diperoleh baik baik kualitas maupun kuantitas; c) produk kreatif, artinya hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja sehingga dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan; d) intensitas yang dicapai.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan yang dilakukan kepala desa Bintuas Kecamatan Natal belum berjalan dengan baik. Dikarenakan strategi yang dibuat kepala desa Bintuas Kecamatan Natal untuk mencapai tujuan tersebut belum maksimal dalam hal pelaksanaannya.

Sebagaimana diuraikan pada sub bab penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di kantor desa Bintuas Kecamatan Natal. Pelaksanaan strategi yang dibuat oleh kepala desa tidak berjalan maksimal hal ini dapat dibuktikan dari wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 08 februari 2019 dengan Bapak Lisardo SE selaku kaur pembangunan desa mengatakan bahwa pelaksanaan strategi kurang maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut ialah kurangnya komunikasi antara perangkat desa.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa strategi yang disusun sudah cukup baik akan tetapi didalam pelaksanaan tidak berjalan dengan maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kepala desa harus meningkatkan partisipasi dari perangkat desa lainnya yang di lakukan adalah dengan menciptakan suasana kekeluargaan di kantor kepala desa, sehingga pada saat akan melakukan koordinasi perangkat desa bisa lebih aktif lagi dikarenakan suasana yang sudah seperti keluarga jadi tidak sungkan lagi dalam mengemukakan pendapat dan kritiknya serta lebih semangat lagi dalam menjalankan tupoksi masing – masing perangkat desa.

4.3.3 Adanya pengarahan langsung dari atasan kepada bawahan

Menurut Hasibuan dalam Deswimar (2009:86-87) salah satu koordinasi vertikal adalah adanya pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit. Tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabannya secara langsung.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa pengarahan langsung yang dilakukan kepala desa Bintuas Kecamatan Natal cukup maksimal tetapi di dalam

pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Itu dapat dilihat dari kegiatan koordinasi yang dilakukan kepala desa.

Sebagaimana yang diuraikan pada penyajian data yang mengurai tentang hasil wawancara di kantor desa Bintuas Kecamatan Natal. Bentuk pengarahan yang dilakukan kepala desa secara langsung terhadap perangkat desa akan tetapi tidak ada langkah-langkah secara khusus yang dilakukan kepala desa dalam memberikan pengarahan hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rasdan, Ibu Yuliani Nst, Bapak Rahmudin Nst, Bapak Lisardo SE dan Ibu Ratna Sari selaku kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, kaur pembangunan desa dan kaur kesejahteraan desa yang mengatakan bahwa tidak ada langkah yang dilakukan dalam memberikan pengarahan serta pengarahan yang dilakukan secara langsung.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai adanya pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit, tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Pengarahan yang dilakukan kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal yaitu dengan pengarahan secara langsung, terkait dengan apakah pernah memberikan langkah-langkah strategi kepada bawahannya kepala desa tidak pernah memberikan langkah-langkah strategi. Didalam melakukan pengarahan terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya motivasi dan komunikasi sesama perangkat desa sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara kepala desa dengan perangkatnya. Dimana motivasi disini berupa semangat, dikarenakan kurangnya semangat perangkat desa di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala desa dan akan

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Untuk mengatasi Kendala tersebut kepala desa harus lebih aktif berkomunikasi langsung dengan perangkat dan memberikan motivasi baik berupa dorongan semangat, dorongan berupa penyuluhan agar perangkat desa bisa mencintai pekerjaannya dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

4.3.4 Adanya Kerja Sama

Menurut Hasibuan dalam Deswimar (2009:68-67) koordinasi vertikal (*vertical coordination*) salah satunya yaitu salah satunya adanya kesatuan-kesatuan kerja atau adanya kerja sama yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan oleh pemimpin atau kepala desa karena kepala desa bisa memberi sanksi terhadap aparat desa. Untuk mencapai tujuan bersama di perlukan kerja sama yang baik.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa kerja sama yang dilakukan kepala desa Bintuas Kecamatan Natal belum bisa dikatakan baik karena dalam melakukan kerja sama antara perangkat desa masih sering terjadi komunikasi yang tidak baik.

Sebagaimana yang diuraikan pada penyajian data yang mengurai tentang hasil wawancara di kantor desa Bintuas Kecamatan Natal. dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang adanya kerja sama yang dilakukan sesama perangkat desa, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut, maka jika dikaji secara konseptual, dimana kerja sama yang dilakukan perangkat desa Bintuas Kecamatan Natal belum bisa dikatakan baik meskipun dalam bentuk kerja

samanya sudah cukup baik, tetapi didalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan belum cukup baik karena kurangnya komunikasi antara perangkat desa.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa yaitu kerukunan, saling menghargai sesama perangkat desa. Dengan cara lebih memahami keadaan maupun situasi dan kondisi lingkungan kerja. Serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan begitu akan membuat kerja sama yang baik. Di dalam melakukan kerja sama antara kepala desa dengan perangkat desa terdapat beberapa kendala yaitu masih kurang aktifnya komunikasi kepala desa dengan perangkat desa sehingga sering terjadi tidak maksimalnya kerja-kerja pemerintahan desa. Untuk mengatasi kendala tersebut kepala desa berperan lebih aktif lagi di dalam berkomunikasi dengan perangkat desa supaya tidak terjadi lagi kesah pahaman dengan tugas-tugas tiap perangkat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa efektivitas koordinasi vertikal kepala desa yang dilakukan tidak efektif. Hal dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Pertama didalam melaksanakan koordinasi vertikal kepala desa tidak memiliki perencanaan terlebih dahulu. Sehingga pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, itu bisa dilihat dari pelaksanaan koordinasi yang dilakukan kepala desa pada saat ini. Seharusnya kepala desa membuat perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan koordinasi vertikal agar pelaksanaan koordinasi tersebut berjalan dengan maksimal. Salah satu tujuan koordinasi adalah untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta

pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi dengan hal ini perencanaan diperlukan dalam hal koordinasi.

Kedua adanya strategi pencapaian tujuan yang tidak efektif dalam hal pelaksanaannya. Dimana dalam hal ini kepala desa memiliki strategi yang cukup baik tetapi didalam pelaksanaannya kepala desa maupun perangkat desa lainnya tidak dapat menjalankan strategi tersebut dengan baik sehingga koordinasi tidak berjalan dengan semestinya dan tujuan pemerintah desa tidak tercapai. Dengan demikian strategi yang dimiliki kepala desa tidak berjalan efektif.

Ketiga pengarahan langsung yang dilakukan kepala desa cukup maksimal tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Kepala desa memberikan arahan kepada perangkat desa lainnya namun perangkat desa tidak dapat menjalankan arahan yang telah diberikan kepala desa. Dengan demikian pengarahan langsung yang diberikan kepala desa terhadap perangkat desa tidak efektif.

Keempat adanya kerja sama, kerja sama antara sesama perangkat desa belum bisa dikatakan karena kerja sama yang dilakukan masih sering terjadi kesalah pahaman sesama perangkat desa hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para narasumber. Seharusnya para perangkat desa memiliki sara keterbukaan mengenai mengenai pemerintahan desa agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat merusak kerja sama antara perangkat desa. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah penelitian dilaksanakan penulis tentang efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Yang dilakukan kepala desa dalam membuat perencanaan dalam melakukan koordinasi vertikal kurang baik karena tidak ada perencanaannya khusus yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan koordinasi vertikal hanya saja pengarahan-pengarahan yang diberikan kepala desa kepada perangkatnya sehingga kurang maksimalnya koordinasi yang dilakukan.
2. Adanya strategi pencapaian tujuan, strategi yang dilakukan kepala desa dalam melakukan koordinasi vertikal tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Kurang berpartisipasinya perangkat desa dalam melaksanakan koordinasi serta komunikasi yang kurang baik yang terjadi diantara sesama perangkat desa. Akibat dari kendala-kendala tersebut membuat tidak berjalannya koordinasi yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa
3. Pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa dalam melaksanakan koordinasi cukup maksimal. Tetapi didalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, itu dapat dilihat dari kegiatan koordinasi yang dilakukan kepala desa Bintuas Kecamatan Natal.

4. Kerja sama yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan koordinasi belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut dilihat dari jawaban-jawaban paranasumber yang mengatakan bahwa kurang aktifnya komunikasi yang dilakukan dan saling curigan sesama perangkat. Kegiatan-kegiatan koordinasi yang tidak terjadwal bisa dilihat di koordinasi yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa.
5. Koordinasi vertikal yang dilakukan kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal tidak berjalan efektif, hal itu dapat dilihat tidak adanya perencanaan, strategi untuk mencapai tujuan yang tidak berjalan maksimal, pengarahan langsung yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, serta kerja sama yang dilakukan tidak efektif.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran berdasarkan apa yang telah penulis ketahui mengenai efektivitas koordinasi vertikal kepala desa di desa Bintuas Kecamatan Natal adalah :

1. Dalam melakukan koordinasi vertikal seharusnya kepala desa mempunyai perencanaan terlebih dahulu supaya dalam menjalankan koordinasi tersebut bisa berjalan dengan maksimal
2. Dalam melakukan koordinasi vertikal kepala desa harus mempunyai langkah-langkah strategi agar koordinasi yang dilakukan lebih efektif.
3. Diharapkan kepala desa lebih memaksimalkan pengarahannya supaya supaya kegiatan dalam pemerintahan berjalan dengan baik dan kepala desa diharapkan melakukan sebuah perubahan didalam cara menyampaikan pengarahan supaya perangkat tidak bosan, sehingga kegiatan dalam pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik.
4. Menjalin kerja sama yang baik pada sasama perangkat desa agar terciptanya hubungan yang baik sehinga tercapainya tujuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anggara, Sahya dan Sumantri, Li. 2016. *Adminitrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur suatu penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Azhari, Rida. 2017. Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. ISSN 2477-2458: 543-556
- Danim, Sudirman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT.Rineka Cipta
- Deswimar, Devi. 2018. Pengaruh Koordinasi Vertikal Dan Horizontal Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Uin Suska Riau: 67-76
- Gibson, dkk. 1992. *Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Handayani, Tri Rizki. 2017. Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Nelayan Di Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan. Skripsi: UMSU.
- Hidayati, Tri. 2018. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Kasus Kepemimpinan Empat Kelurahan Di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta): 1-26
- Irbiana, Yulia Erha. 2016. Efektivitas Penilaian Prestasi Kerja Pns (Pegawai Negeri Sipil) Di Kantor Regional Ii Badan Kepegawaian Negara Surabaya. Vol 4: 1-10
- Moleong, Lexy J. 2012: *Meteologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nainggolan, Devi Rahmaini. 2016. Efektivitas Program Pembangunan Wisata Pantai Bosur Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Skripsi: UMSU.

Rihardini. 2012. Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranometto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2010. Skripsi: UNESA.

Setiawan, Hendrik. 2014. Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya): 1-18

Siagian, Sondang P. 2001. *Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Aksara

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 114 mengenai Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Waluyo. 2007: *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju

Welly. 2013. Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Secara Partisipatif Di Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. ISSN 0000-0000: 31-45

<https://kbbi.web.id/desa> (diakses pada 30 desember 2018)

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Koordinasi Vertikal Kepala Desa Di Desa Bintuas

Kecamatan Natal

Nama :

Umur :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan:

a. Adanya Perencanaan

- 1) Bagaimana perencanaan yang di lakukan dalam koordinasi vertikal?
- 2) Bagaimana perencanaan kegiatan pembangunan di Desa Bintuas?
- 3) Apakah kendala yang di hadapi dalam perencanaan koordinasi vertikal?
- 4) Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

b. Adanya Strategi Pencapaian Tujuan

- 1) Strategi apa saja yang di lakukan dalam meningkatkan koordinasi vertikal?
- 2) Bagaimana strategi dalam mengkoordinasikan perangkat desa untuk membahas pembangunan desa?
- 3) Kendala apakah yang dihadapi dalam menjalankan koordinasi?
- 4) Bagaimana cara mengatasi kendala yang timbul dari koordinasi yang dilakukan?

c. Adanya Pengarahan

- 1) Bagaimana bentuk pengarahan yang dilakukan kepala desa dalam mengkoordinasikan perangkat desa dengan tujuan membahas pembangunan desa?
- 2) Dalam melakukan pengarahan apakah kepala desa pernah memberikan langkah-langkah strategi kepada bawahannya?
- 3) Apakah kendala yang di hadapi dalam memberikan pengarahan?
- 4) Bagaimana cara mengatasi kendala – kendala tersebut?

d. Adanya Kerjasama

- 1) Bagaimana bentuk kerjasama yang di lakukan kepala desa dengan perangkat desa?
- 2) Bagaimana cara melakukan bentuk kerjasama kepala desa dengan perangkat desa?
- 3) Kendala apa saja yang di hadapi dalam melakukan kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa?
- 4) Bagaimana cara mengatasi kendala dalam meningkatkan kerjasama kepala desa dengan perangkat desa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rino Hardianto
Tempat/Tanggal Lahir : Bintuas, 11 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Jl. Lintas Pantai Barat Bintuas Kec.Natal
Anak Ke : 1 (Satu) dari 2 (dua) bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Dirman
Ibu : Rohanur
Alamat : Jl. Lintas Pantai Barat Bintuas Kec.Natal
Riwayat Pendidikan :

1. Tamat SD Negeri 147569 Bintuas Tahun 2009, berijazah;
2. Tamat SMP Negeri 1 Natal Tahun 2012, berijazah;
3. Tamat SMA Negeri 1 Natal Tahun 2015, berijazah;
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Rino Hardianto